

BAB III

UPAYA CHINA DALAM MEMPERTAHANKAN TIBET

Perlawanan dan tuntutan yang dilakukan oleh rakyat Tibet, merupakan suatu ancaman dan penghambat bagi pemerintah China, untuk mempertahankan Tibet. Sikap rakyat Tibet atas semua pemberontakannya, dianggap oleh pemerintah China sebagai gerakan separatisme. Terlebih lagi dengan adanya campur tangan negara lain dalam masalah ini. Hal ini, dinilai oleh pemerintah China sebagai ancaman bagi keamanan negara dan keutuhan wilayahnya, sehingga gerakan ini harus dihentikan. Maka, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah China melakukan upaya-upaya terhadap Tibet yang merupakan provinsi dari China yang juga merupakan Daerah Otonomi Khusus China. Upaya-upaya tersebut yaitu:

A. Pemerintahan Era Mao Zedong

1. Persetujuan Mengenai Cara Pembebasan Damai Tibet

Setelah kemenangan China atas perang saudara yang terjadi antara GMD dan PKC, pemerintah China memulai untuk fokus pada daerah-daerah terpencil China, salah satunya adalah Tibet. Pemerintah China mengecam kembali kemerdekaan Tibet karena Pemerintah China merasa bahwa Tibet merupakan wilayah kedaulatan teritori China, tetapi rakyat Tibet menentang kecaman China tersebut, hingga terjadi konflik antara kedua belah pihak. Untuk mempertahankan Tibet, Pemerintah China mencoba mengambil hati rakyat Tibet, dengan mengajukan *cara pembebasan damai Tibet*, karena China melihat bahwa sistem

pemerintahan feodalisme di bawah pimpinan Dalai Lama merupakan tindakan kriminalitas bagi para kaum ploretar yang ada di Tibet. Dalam persetujuan ini, pemerintah China berhasil memenangkan persetujuan mengenai cara pembebasan damai Tibet tersebut, yang ditandatangani pada tahun 1951.

2. Integrasi Bangsa Han

Upaya selanjutnya yang dilakukan China terhadap Tibet yaitu integrasi bangsa Han ke Tibet. Sebagai kesatuan wilayah sejak tahun 1966 sampai 1970-an pada Era Mao Zedong, perkembangan kebudayaan China mulai masuk ke Tibet. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya biara Budha dan artefak budaya Tibet yang hancur tidak terurus, serta masuknya Etnis mayoritas China Han ke Tibet.

Pemerintah China melihat perbedaan budaya dan agama sebagai sumber perpecahan. Alasan lain pemerintah China menginginkan penghapusan budaya asli Tibet, yaitu ingin menghapuskan praktek penindasan bergaya feodalisme di Tibet. Dimana para Dalai Lama dan para penguasa hidup serba berkecukupan di istana, sedangkan banyak masyarakat di luar istana yang menderita kekurangan dan kemiskinan. Pemerintah China berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia sepatutnya mencangkup kepuasan hidup dan kemajuan ekonomi. Dengan kata-kata berlainan, saat mengkaji dirinya, ia melihat kemajuan ekonomi dan kepuasan hidup rakyatnya dengan meningkatkan situasi hak asasi manusianya dan saat melihat situasi di negara-negara maju, ia seringkali menotakan terdapat tingkat kriminalitas dan kemiskinan yang tinggi di tempat-tempat yang justru dikatakan mempunyai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia yang tinggi.

Sebenarnya, integrasi Bangsa Han ke Tibet pada kepemimpinan Mao Zedong, merupakan suatu cara pemerintah China untuk menguasai Tibet secara utuh dan untuk menghapuskan perbedaan ideologi, budaya dan agama yang terjadi antara China dan Tibet, sebagai bentuk dari kebijakan revolusi kebudayaan pada pemerintahan Mao Zedong, yang mana revolusi ini bertujuan untuk mengembangkan budaya dan ideologi Komunisme secara menyeluruh dan radikal di seluruh wilayah China. Dengan melihat perspektif etnosentris yang kuat dari Han, bahkan ketika China dikuasai etnis non-Han, oleh sebab itu Budaya Han dianggap lebih unggul daripada budaya yang lain. Oleh karena itu, daerah-daerah yang ada di China dikuasai dan diperintah oleh orang-orang Han, dengan cara Han yang jika dimasa lalu dengan cara konfusian, maka saat ini dengan cara Komunis.⁵²

Namun, setelah kepemimpinan Mao Zedong berakhir, pemerintah China melihat bahwa dengan adanya revolusi budaya dan lompatan jauh kedepan yang dibawa oleh Mao Zedong, merupakan suatu hal yang dapat menghambat kesejahteraan negaranya, mengingat aktivitas dunia internasional pada masa itu, yang saling berlomba untuk melakukan kerjasama hubungan luar negeri dan berlomba mengambil peran penting dalam dunia internasional. Sehingga pemerintah China di bawah pimpinan Deng Xiao Ping, berniat untuk melakukan perubahan dalam pemerintahannya, khususnya dalam pengubahan struktur perekonomian masyarakat China secara radikal dan fundamental. Dengan

⁵²Aditthegrat. *Nasionalisme Etnis Dan Problem kebangsaan China*.

<http://aditthegrat.wordpress.com/2008/05/28/nasionalisme-etnis-dan-problem-kebangsaan-cina/>.

Diakses 30 Januari 2013.

membuka dan mengizinkan rakyat China dan daerah-daerah yang ada di China untuk melakukan interksi dengan dunia luar secara bebas, sehingga dengan hal tersebut, China dapat ikut serta dalam aktivitas kerjasama dunia internasional dan mengambil peran dalam dunia internasional, juga disisi lain untuk mengembangkan ekonomi negaranya.

Kependudukan Etnis Han yang ada di Tibet sejak masa pemerintahan Mao Zedong, pemerintah China pasca Mao memanfaatkan keberadaannya untuk meningkatkan ekonomi dan kehidupan di Tibet. Sehingga, dengan kehadiran Etnis Han ke Tibet pasca Mao, membuat wilayah Tibet memiliki perekonomian yang lebih baik dan kehidupan yang semakin maju dan mendapat pendidikan yang layak, mengingat Tibet merupakan salah satu provinsi termiskin di China. Masuknya Etnis Han ke Tibet, membantu proses pembangunan dan perbaikan taraf kehidupan di Tibet. Meskipun Etnis Han menjadi kelompok terbesar, tidak serta merta mereka menciptakan tirani mayoritas nama suku ataupun kepercayaan.

Hingga sekarang populasi etnis Han di Tibet semakin banyak dan semakin bertambah pertahunnya. Hal inimenjadikan kehidupan di Tibet lebih maju dan memilki standar hidup yang lebih baik dari Era Mao pada masa masuknya China di Tibet. Hal ini disebabkan keberagaman budaya yang ada di Tibet dan standar hidup Tibet, sehingga pemikiran dan pergaulan rakyat Tibet terbuka ke dunia internasional dan rakyat Tibet memilki pengetahuan yang lebih baik lagi.

3. Pemberian Otonomi Khusus Kepada Tibet

Pemerintah China, memberikan otonomi khusus kepada Tibet tahun 1965 di Era Mao Zedong. Pemberian otonomi khusus ini, disertai dengan suatu

persyaratan kepada Tibet, bahwa meskipun dengan adanya Hak Otonomi Khusus yang diberikan pada Tibet, namun segala bentuk pemerintahan tetap berada di dalam payung kekuasaan China.

Sebagai satu negara multietnis yang bersatu, pemerintah China melaksanakan kebijakan sederajat, bersatu dan saling membantu antara berbagai Etnis, menghormati dan memelihara hak kebebasan kepercayaan agama dan adat istiadat etnis minoritas. Sistem otonom regional Etnis, merupakan satu sistem politik yang penting di China, di bawah pimpinan persatuan negara, para Etnis yang ada di China melaksanakan otonom regional di daerah pemukiman berbagai Etnis minoritas, membentuk lembaga otonom dan melaksanakan hak otonom.⁵³ Pemerintah China melindungi daerah otonom Etnis menurut keadaan, sebaliknya etnis setempat melaksanakan hukum dan kebijakan negara.

Pemerintah China melihat perbedaan budaya dan agama sebagai sumber perpecahan antara China dan Tibet. Dalam hal konflik budaya dan etnis antara China dan Tibet, dengan melihat pemberontakan atas perlawanan yang terus dilakukan rakyat Tibet untuk mendapatkan otonomi khusus dari China. Maka pemerintah China melihat bahwa, terdapat salah satu jalan tengah yang dapat dijadikan suatu kebijakan pemerintah China untuk menyelesaikan konflik China dan Tibet. Kebijakan itu adalah pemberian otonomi khusus dan bukan kemerdekaan, karena China merupakan negara kedaulatan yang memiliki satu wilayah dengan Tibet.

⁵³<http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter6/chapter60104.htm>. Diakses i6 Januari 2013

Berhubungan dengan otonomi khusus Tibet, diselenggarakan sebuah konferensi yang dihadiri oleh perwakilan 10 kawasan otonomi yang ada di dunia sebagai forum untuk berbagi pengalaman yang mereka miliki serta menggali pemahaman yang mungkin berguna bagi penyelesaian kasus Tibet. Mempelajari berbagai cara dan sarana guna mendukung hak-hak rakyat Tibet bagi otonomi yang sebenarnya dan membangun hubungan yang kokoh dengan administrasi pemerintahan Tibet di pengasingan, namun dimata Dalai Lama, otonomi yang diberikan pemerintah China tak dianggap riil otonomi. Konsep riil otonomi pernah disebut-sebut Dalai Lama dalam proposal damai yang ia bacakan di publik Amerika Serikat pada tahun 1987.

Proposal damai tersebut diumumkan oleh Dalai Lama pada tahun 1987, guna mencari tata pemerintahan yang mandiri (*genuine self-governance*). Lima Pokok Rencana Perdamaian (*The Five Point Peace Plan*) tersebut berisikan: (1) Memungkinkan rakyat Tibet hidup dalam kemerdekaan dan kehormatan, (2) Bebas menjalankan agama dan kebudayaan mereka, (3) Serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi.⁵⁴ Dengan anggapan Dalai Lama tersebut, pada tanggal 10 Maret 2006, Dalai Lama menyebutkan soal *high-level autonomy* sebagai solusi untuk China dan Tibet. Namun, tuntutan ini rasanya sangat sulit untuk dipenuhi oleh pemerintah China, mengingat China merasa telah memberikan otonomi untuk kawasan tersebut. Persoalan otonomi ini, mendapat respon yang cukup berarti dari pemerintahan China, dalam melakukan negosiasi dengan Dalai Lama dalam berbagai isu, terkecuali mengenai

⁵⁴Konferensi Internasional Tentang Kawasan Otonomi Bagi Tibet.
<http://www.kedai-kebebasan.org/berita/demokrasi/article.php?id=276>. Diakses 16 Januari 2013.

kemerdekaan pada satu posisi dan posisi konsistensi untuk tak menggunakan kekerasan.

Sebuah analisis yang dikemukakan oleh penulis asal Tibet, Yedor, pada pertengahan tahun 2006. Menurut Yedor China tak mungkin memberikan keistimewaan kepada Tibet, seperti yang diberikan kepada Hongkong dan Makau karena kapitalisme tak pernah eksis di Tibet.⁵⁵ Kepemimpinan Dalai Lama tak hanya sekedar sebagai pimpinan agama tetapi juga politisi, ini menunjukkan bahwa wilayah Tibet masih menyisakan warisan feodalisme yang kental. Dalam situasi inilah, China tak mau sembarangan memberikan perluasan otonomi kepada Tibet. Menurut dokumen *regional ethnic autonomy in Tibet*, disebutkan bahwa kondisi Tibet berbeda dengan Hongkong dan Makau. Untuk itu tidak akan ada perubahan sistem sosial atau politik apapun di Tibet. Oleh karena itu, segala upaya untuk mengubah dan menghancurkan sistem politik yang saat ini berlaku di Tibet, merupakan perlawanan atau pelanggaran hukum dan perundangan China.

Otonomi menjamin adanya sebuah desentralisasi dan pendelegasian kekuasaan. Pemimpin Tibet Dalai Lama, menjamin dan memungkinkan sebuah komunitas atau masyarakat mengatur tata pemerintahan mereka sendiri. Dengan mengacu pada wilayah yang memang membutuhkannya, sehingga dapat dilihat sebagai kunci menuju pembangunan, tata pemerintahan yang baik, demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta hak-hak dasar kebebasan manusia.

Pengaturan mengenai otonomi, memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga persatuan dan keutuhan suatu negara, dimana pada saat yang bersamaan,

⁵⁵Baihaqi falaq A.A. 2010. *Konflik china-tibet dan terjadinya pelanggaran ham oleh china*. Penerbit Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

juga memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat serta budaya. Otonomi bukanlah suatu langkah awal menuju kehancuran bangsa, seperti yang ditakutkan oleh sebagian orang. Bahkan sebaliknya, banyak negara mungkin tak akan dapat bertahan karena tidak mengakomodasi perbedaan ini melalui desentralisasi dan otonomi.

Pemerintah China memberikan otonomi khusus dan bukan kemerdekaan ke Tibet, karena China merupakan negara kedaulatan yang memiliki satu wilayah dengan Tibet. Sehingga pemerintah China akan terus mengupayakan pertahanan Tibet untuk tetap menjadi satu wilayah dengan China, pemerintah China juga memiliki kedaulatan atas wilayah teritorinya, oleh sebab itu pemerintah China akan terus mempertahankan Tibet, tanpa memikirkan dan menghiraukan resiko apapun.

Hingga sekarang, pemerintah China tetap mempertahankan kebijakan otonomi khusus Tibet yang telah diberikan pada masa Mao Zedong. Meskipun Dalai Lama sebagai pemimpin separatis Tibet menginginkan pemberian otonomi khusus yang lebih luas oleh pemerintah China, namun pemerintah China tidak menyetujui pemberian otonomi tersebut.

B. Pemerintahan Pasca Mao Zedong

1. Perbaikan Standar Hidup di Tibet

Pada era Mao, Tibet diberlakukan dengan adanya larangan untuk melakukan hubungan atau kerjasama dengan dunia internasional. Namun, setelah masa pemerintahan Mao Zedong berakhir, pemerintahan China pasca Mao

memberlakukan reformasi dan keterbukaan pada Tibet. Rakyat Tibet diberikan izin untuk melakukan interaksi dengan negara lain, karena pemerintah China pasca Mao menilai bahwa adanya kerjasama dan membuka diri kepada dunia internasional, merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.

Kehadiran sekelompok orang dengan budaya dan bahasa yang berbeda menimbulkan suatu konflik etnis tersembunyi di bawah kepemimpinan pusat China. Demi menjaga integritas teritorinya, pemerintah China menggunakan kekuatan militernya untuk menduduki Tibet. Dengan adanya keinginan Dalai Lama yang menghendaki otonomi khusus dan pengakuan formal dari masyarakat internasional bahwa Tibet merupakan wilayah yang merdeka, membuat pemerintah merasa bahwa integritasnya terancam. Pemerintah China selalu berusaha menjaga kedaulatan dan integritas negerinya, sebagai wujud dari sikap China yang menentang segala bentuk intervensi oleh negara adidaya yang berusaha untuk menciptakan ketidakseimbangan global.

Hal ini membuat pemerintah China semakin kuat dalam menjaga persatuan wilayahnya. Terlebih lagi para pro Tibet yang melakukan unjuk rasa dan berusaha menarik perhatian kepada dunia internasional dengan status Tibet sebagai wilayah yang terjajah. Namun dibalik semua yang terjadi, justru dinilai positif oleh masyarakat internasional, dengan melihat kemajuan pembangunan dan perekonomian yang ada di Tibet. Dukungan bagi China pun mulai berdatangan dan menjadikan konflik antara keduanya makin meruncing.

Setelah keadaan nasional mulai stabil, pemerintah China mengucurkan dana besar untuk pembangunan daerah-daerah bagian Barat negeri yang tertinggal termasuk Tibet, untuk memperbaiki standar hidup wilayah-wilayah terbelakang di China. Sebagian besar rakyat Tibet lebih memilih penguasaan China daripada penguasa Lama Tibet, mereka berasal dari kalangan kaum miskin dan kaum budak. Nyatanya, Tentara Pembebasan membebaskan mereka, sehingga sistem perbudakan itu tidak ada lagi di Tibet. Sejauh ini Tibet berkembang menjadi suatu daerah yang lebih maju, orang yang berpendidikan yang dahulunya dari kalangan rendah menjadi lebih baik dan selalu bertambah. Pemerintah China juga mengadakan pembangunan infrastruktur, institusi pendidikan, rumah sakit dan lain-lain demi meningkatkan standar hidup di Tibet.

Segolongan orang kaya dan elite yang pernah menikmati sistem perbudakan di Tibet, membenci China karena hak-hak privilege mereka sebagai kaum elite terhapus. Tentu saja ada kalangan-kalangan Borju yang masih merindukan zaman keemasan mereka. Mereka berlindung di balik negara-negara Barat meneriakkan HAM. Memang, HAM mereka sebagai seorang para Borju terinjak-injak karena mereka tidak lagi diberi kesempatan untuk menganiaya dan mempergunakan budak-budaknya sekehendak hatinya.

Kalau sekarang para Lama di Tibet berteriak tentang HAM, ini berarti mereka menengok sejarah bahwa para Lama juga menjadi bagian elite dalam masyarakat Tibet yang tutup mata, bahkan ikut menindas dan mempergunakan keringat dan jerih payah kaum budak. Hal yang dilakukan oleh para elite Tibet inilah, yang sebenarnya merupakan pelanggaran HAM di mata pemerintah China.

Tentara Pembebasan, memang dalam satu sisi melanggar hak istimewa kaum borju Tibet, tetapi di sisi lain, mereka menjadi pahlawan yang nyata di mata para budak di Tibet. Pemerintah China, senantiasa memperbaiki sistem pemerintahan, pembangunan dan hubungan pusat dengan daerah ini. Untuk meningkatkan standar hidup di Tibet dan untuk melaksanakan perubahan struktur perkonomian masyarakat China juga daerah-daerah terpencil China, maka pemerintah China melakukan berbagai macam pembangunan-pembangunan dan sebagai perwujudannya, pemerintah China telah menyelesaikan suatu mega proyek yaitu pembangunan jalan kereta api menuju Tibet satu-satunya di dunia, The Qinghai-Tibet Railway "*road to heaven*". Jaringan kereta api ini dibangun di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut dan orang juga menyebutnya "*By train on the roof of the world*". Pembangunan ketera api inibertujuan untuk mempermudah keluar masuknya masyarakat dari laur dan dalam Tibet, sehingga dapat menjadi salah satu tindakan yang menjamin terjadinya peningkatan standar hidup di Tibet.

Di bawah pemerintahan China selama hampir empat dekade terakhir, Tibet telah banyak mengalami perubahan mulai dari ekonomi, industri hingga tranportasi. Pemerintah China membuka wilayah Tibet dan membangun banyak jalan raya yang menghubungkan Tibet dengan provinsi-provinsi tetangga, sehingga melepaskan isolasi rakyat Tibet dari keterbelakangan sebagai suatu bentuk upaya China untuk mempertahankan integritas teritorinya atas wilayah Tibet. Modal asing dan turis mancanegara pun banyak berdatangan untuk menikmati keindahan panorama negeri Tibet. Pembangunan yang dilakukan

pemerintah China di Tibet, adalah bentuk dari memodernisasikan Tibet dari keterbelakangan dan dari keterasingannya terhadap dunia. Pemerintah China berharap dengan adanya kereta super cepat ke Tibet, merupakan awal bagi kemajuan perdagangan, kemajuan ekonomi dan kemajuan pendidikan.

Hingga kini, pemerintah China masih terus melakukan pembangunan-pembangunan di wilayah Tibet. Baru-baru ini tepatnya pada awal tahun 2011, pemerintah China membangun bandara tertinggi di dunia. Pembangunan ini memakan biaya 2,5 triliun atau sekitar 1,8 miliar yuan, pengerjaannya sendiri diprediksi memakan waktu hingga tiga tahun. Bandara tertinggi sebelumnya berada di Kota Qamdo, juga berada di Tibet, dengan ketinggian 4.334 meter dan sekarang dataran tinggi Tibet telah memiliki lima bandara sipil. Pembangunan di wilayah Tibet yang memakan biaya miliaran yuan ini, juga merupakan cara pemerintah China dalam mengambil hati rakyat Tibet dan untuk menguasai Tibet secara utuh.

Namun Dalai Lama di pengasingan, melihat perubahan yang ada di Tibet saat ini, seperti perdagangan yang semakin maju, kemajuan perekonomian, kemajuan pendidikan, hanya merupakan manipulasi yang dijadikan pemerintah China sebagai kamufase untuk menguasai Tibet secara lebih luas lagi.